

Pola hubungan keuangan pemerintah pusat daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Di Indonesia

Selamet Rahmadi*; Dwi Hastuti

Prodi Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

**Email korespondensi: selametselamet023@gmail.com*

Abstract

The research aims to analyze economic growth and the degree of fiscal decentralization (DDF) and measure the influence of the pattern of central-regional government financial relations from the degree of fiscal decentralization (DDF) on the economic growth of each province in Indonesia. The research method uses the Field Research method with secondary data in the form of a time series for 2005-2020. Data comes from the Indonesian Provincial Central Statistics Agency and the Directorate General of Financial Balance of the Republic of Indonesia. The analysis uses quantitative descriptive methods and simple regression methods. The research results concluded that during 2005-2020, provinces in Indonesia experienced an increase in average economic growth. DDF on average falls into the low category with a consultative relationship pattern and has varying influences, namely positive/negative and significant/not significant on economic growth.

Keywords: *economic growth, fiscal decentralization, central government finance*

Abstract

Penelitian bertujuan, menganalisis pertumbuhan ekonomi dan derajat desentralisasi fiskal (DDF) dan mengukur pengaruh pola hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah dari derajat desentralisasi fiskal (DDF) terhadap pertumbuhan ekonomi tiap-tiap provinsi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode *Field Research* dengan data sekunder berbentuk runtut waktu (*time series*) tahun 2005-2020. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi dan Indonesia serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Analisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan metode regresi sederhana (*Simple Regression*). Hasil penelitian disimpulkan selama tahun 2005-2020, provinsi di Indonesia rata-rata pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. DDF rata-rata masuk dalam katagori rendah dengan pola hubungan konsultatif serta memiliki pengaruh yang bervariasi, yaitu positif/negatif dan signifikan/tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Kata kunci Pertumbuhan Ekonomi, desentralisasi fiskal, keuangan pemerintah pusat

PENDAHULUAN

Kompleksnya permasalahan pembangunan didaerah, mendorong pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaannya. Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan tersebut dilakukan lewat pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah seoptimal mungkin, baik sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).

Kemampuan menggali potensi sumberdaya untuk dapat dijadikan sebagai potensi sumber penerimaan daerah menjadi sesuatu keharusan bagi daerah.

Upaya meningkatkan penerimaan daerah di Indonesia, khususnya provinsi telah diberikan melalui kebijakan desentralisasi (otonomi daerah) dibidang fiskal kepada setiap daerah. Pemberian otonomi diharapkan mampu mendorong daerah mengelola keuangannya secara lebih baik dalam mengelola dan menata rumah tangganya kecuali urusan pemerintah pusat yaitu hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan pertahanan keamanan (Mahmudi, 2016).

Daerah dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila bisa mengurus semua kegiatan penyelenggaraan administrasi dan pembangunan dengan menggunakan sumber keuangan sendiri (Suhanda, 2017). Sumber penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah. Meningkatnya sumber-sumber penerimaan dapat menjamin ketersediaan dana (belanja) dan memberi rasa aman bagi kelangsungan pembiayaan pembangunan didaerah. Penerimaan daerah di Indonesia sangat bervariasi dan ditentukan banyak faktor yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya alam, lokasi, iklim, geografis dan tradisi masyarakat (Halim, 2019).

Perbedaan faktor tersebut dapat menjadi penghambat utama dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah. Perbedaan tersebut akan mengakibatkan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan akan berbeda dan pencapaian hasil pembangunan berbeda serta tidak merata (Mustaqiem, 2017). Peningkatan kapasitas anggaran pada pembiayaan pembangunan dapat dilakukan lewat pendapatan asli daerah sendiri, yaitu PAD. Penerimaan PAD yang besar akan memberikan *share* yang besar pada pendapatan serta bagi belanja daerah.

Kemampuan penerimaan PAD dalam membiayai pengeluaran (belanja) mencerminkan kemampuan daerah melaksanakan otonomi, mengurangi ketergantungan keuangan dan menjelaskan bagaimana kaitan keuangan pemerintah pusat-daerah. Hubungan fiskal tersebut menurut Halim dalam Aji dkk (2019) adalah instruktif, konsultatif, partisipatif dan delegatif.

Kemampuan daerah mengurangi ketergantungan keuangan terhadap pusat yang semakin kecil, artinya daerah mampu membiayai kebutuhan belanja daerah dalam kegiatan pembangunan secara mandiri dan campur tangan pusat yang semakin kecil (Mardiasmo, 2018). Belanja pada masing-masing daerah dari PAD digunakan dalam bentuk *direct dan indirect*. Belanja daerah merupakan rincian kegiatan/program yang dilaksanakan daerah setiap tahun. Banyaknya kegiatan/program yang dilaksanakan maka menuntut semakin besar ketersediaan dana dan sebaliknya (Mahmudi, 2019).

Belanja daerah sebagai bentuk investasi pemerintah, digunakan sebagai pengeluaran operasional untuk meningkatkan pelayanan kegiatan ekonomi masyarakat dan pengeluaran dalam rangka pembentukan modal/aset tetap (Rosnidah, 2018). Besarnya alokasi belanja diharapkan memberi pengaruh terciptanya efisien, efektif dalam pencapaian hasil yang baik dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, daerah dan nasional (Suparmoko, 2013).

Pembangunan didaerah terutama pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan perubahan kehidupan dan tingkat kemakmuran masyarakat dan itu diperoleh melalui pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2019). Laju pertumbuhan ekonomi dalam teori Neo Klasik ditentukan oleh akumulasi kapital sebagai investasi, baik swasta maupun pemerintah (Arsyad, 2018). Adanya investasi tersebut maka pertumbuhan ekonomi dapat terjadi yang ditandai meningkatnya kapasitas produksi yang mendorong kenaikan pendapatan nasional dalam suatu jangka waktu (Subandi, 2018).

Upaya setiap provinsi di Indonesia meningkatkan kemampuan penerimaannya terus dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki menjadi sumber penerimaan dalam melaksanakan otonomi. Ukuran kemampuan tersebut diukur menggunakan derajat desentralisasi fiskal (DDF). DDF merupakan rasio kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Aji dkk, 2019 dan Anisa dkk, 2021). Total penerimaan daerah provinsi di Indonesia Tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan yang bervariasi. Provinsi dengan rata-rata peningkatan penerimaan tertinggi adalah provinsi DKI. Jakarta 13,64% dan terendah provinsi Papua 4,46% sementara rata-rata peningkatan seluruh provinsi di Indonesia 9,86%. Peningkatan total penerimaan terjadi disebabkan meningkatnya PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rata-rata perolehan PAD tertinggi terdapat di provinsi Maluku Utara 25,80% dan terendah provinsi Kalimantan Tengah 1,40% serta rata-rata peningkatan seluruh provinsi di Indonesia 8,54%. Penerimaan dana perimbangan rata-rata terbesar adalah provinsi Papua 32,14% dan terendah provinsi Sulawesi Barat 5,49%. Rata-rata lain-lain pendapatan daerah yang sah terbesar yaitu provinsi Papua Barat 26,11% dan terendah provinsi Bangka Belitung 7,92%.

Perbedaan total penerimaan daerah dan PAD menyebabkan kemampuan dan hubungan keuangan daerah antar provinsi berbeda-beda terhadap pemerintah pusat. Kemampuan yang berbeda mengakibatkan perbedaan anggaran belanja daerah di setiap provinsi di Indonesia. Terbatasnya kemampuan anggaran membiayai kegiatan/program pembangunan berdampak pada peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa (produksi). Kondisi ini mempengaruhi perkembangan ekonomi setiap provinsi di Indonesia. Provinsi yang mempunyai rata-rata peningkatan ekonomi tertinggi di Indonesia tahun 2016-2020 adalah provinsi Sulawesi Tengah 7,22 % dan terendah provinsi NTB sebesar 0,75% sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 3,73%.

Penerimaan PAD meningkat pada semua provinsi mempengaruhi besarnya kontribusi terhadap total penerimaan serta mendorong meningkatnya kemampuan keuangan atau derajat desentralisasi fiskal (DDF) masing-masing provinsi. Terjadinya peningkatan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah yang dilakukan di setiap aspek dalam perekonomian.

Fenomena yang terjadi pada keuangan di setiap provinsi tersebut sangatlah menarik untuk diukur dan diteliti lebih lanjut, bagaimana sesungguhnya bentuk pola hubungan keuangan pemerintah daerah-pusat diukur dari DDF dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut Mahmudi (2019) ialah hak dan kewajiban daerah dalam bentuk uang dan kekayaan lainnya dalam konteks Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. APBD merupakan rincian tentang arah, tujuan, prioritas pembangunan yang akan/sedang dilaksanakan daerah dan ukuran kemampuan keuangan daerah dalam berotonomi (Halim, 2014) atau desentralisasi fiskal (Royda dan Riana, 2019). Halim (2019) menguraikan ruang lingkup anggaran pendapatan belanja daerah adalah PAD, dana perimbangan, lain-lain penerimaan yang sah dan pinjaman.

Pengelolaan APBD dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah harus memperhatikan azas kesamaan, ketaatan, serta berguna buat masyarakat (Berliani, 2016 dan Eko, 2020). Pengelolaan yang tepat dapat meningkatkan investasi serta

pertumbuhan ekonomi (Linawati dan Suhardi, 2017) dan Kawa (2011) dalam Adi dan Tahar (2015). Pembangunan menghendaki adanya perubahan dalam setiap aspek dalam perkonomian dan ini terkait erat sama kenaikan perekonomian.

Desentralisasi

Desentralisasi (otonomi daerah) merupakan kebijakan penyerahan wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri dan meminimalisir peran pemerintah pusat. (Khusaini, 2019). Otonomi daerah berlaku di Indonesia sejak berlakunya UU No. 22 dan 25 tahun 1999. Desentralisasi secara prinsip terbagi atas: desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi fiskal (Osoro, 2003 dalam Khusaini, 2019).

Desentralisasi fiskal bentuk penyerahan wewenang bidang keuangan pada pemerintah daerah adalah alat ukur dalam menjaga kesinambungan fiskal (*Fiscal Sustainability*) dan mengoreksi disparitas keuangan pusat dengan daerah (*Vertical Imbalance*) (Suparmoko, 2019).

Desentralisasi fiskal sebagai alat ukur pengelolaan keuangan daerah berfungsi mendorong terciptanya efisiensi dalam perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suprayitno, 2018). Pengaruh penting desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dijelaskan dalam penelitian Royda dan Riana (2019), Berliani (2016), Hidayat (2021) dan Astuti dan Mispianiti (2019).

Pertumbuhan ekonomi

Pembangunan menghendaki adanya perubahan dalam setiap aspek dalam perkonomian dan ini terkait erat sama kenaikan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi daerah/negara diketahui dari nilai produk domestik bruto (PDB)/produk domestik regional bruto (PDRB) yang dihasilkan setiap tahun (Sukirno, 2017). Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicapai melalui pemberian otonomi pada daerah (Eka dan Umar, 2019). Otonomi daerah membagikan kebebasan ke pemerintah daerah untuk merencanakan anggaran sendiri dan menetapkan kebijakan untuk mengelola kekuatan yang ada seoptimum mungkin guna menaikkan kegiatan ekonomi daerah (Arsyad, 2018). Terjadinya pertumbuhan ekonomi merupakan potensi bagi daerah dalam meningkatkan anggaran, baik penerimaan dan pengeluaran (Karenina dkk, 2021).

Aspek lain yang menyebabkan terjadinya naiknya ekonomi ialah :investasi (Jhingan, 2017), PMDN, FDI dan defisit anggaran (Eka dan Umar, 2019), tingkat kemandirian keuangan daerah (Karenina dkk, 2021), derajat desentralisasi (Adi dan Tahar, 2015), pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, pendapatan lain-lain yang sah dan tingkat kemandirian daerah (Puspita dan Septiani, 2019)

METODE

Jenis dan Sumber Data

Studi ini menggunakan data sekunder berbentuk *time series* selama tahun 2005-2020 setiap provinsi di Indonesia dari hasil publikasi suatu kantor atau lembaga dalam kurun waktu tertentu. (Arikunto, 2010). Jenis data yang digunakan adalah realisasi total penerimaan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia. Sumber data dari BPS yakni Statistik Provinsi Dalam Angka, Statistik Indonesia, Statistik Keuangan Kabupaten/Kota dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Indonesia.

Metode analisis data

Metode untuk mengukur tujuan penelitian pertama yaitu perkembangan dan derajat desentralisasi fiskal (DDF) masing-masing provinsi di Indonesia sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi (Anisa dkk, 2021)

$$R_x = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) (Puspita dan Septiani, 2019)

$$DDF = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Hasil perhitungan DDF selanjutnya dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan, rasio kemandirian dan pola hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah. DDF dapat dikelompokkan dengan memaki ketentuan

Tabel 1. Kriteria pola hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Sangat rendah	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi (Mandiri)	> 75 – 100	Delegatif

Sumber: Puspita dan Septiani (2019)

Metode kuantitatif

Metode ini dipakai untuk mengukur tujuan kedua yaitu pengaruh pola hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah yang dilihat dari derajat desentralisasi fiskal (DDF) atas pertumbuhan ekonomi tiap-tiap provinsi di Indonesia. Metode analisis memakai model regresi linier sederhana (*simple regression model*) sebagai berikut : (Widarjono, 2018).

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + e_i \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

Y_i : Pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di Indonesia dalam persen

X_1 : DDF setiap provinsi di Indonesia dalam persen

β_0 : Intersep

β_1 : Koefisien parameter regresi

e_i : Error terms

Uji hipotesis

Uji t statistik

Uji ini dilakukan bertujuan mendapatkan tingkat signifikansi variabel bebas (independen) terhadap variabel tidak bebas (dependen). (Widarjono, 2018). Hipotesis kerja penelitian yang digunakan adalah :

$H_0 : \beta_1 = 0$, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta_1 \neq 0$, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengambilan keputusan uji t statistik menggunakan ketentuan : 1). Jika t-statistik t-tabel, maka menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya ada pengaruh signifikan variabel

independen terhadap variabel dependen. 2). Jika t -statistik $<$ t -tabel, maka menerima H_0 dan menolak H_a . Artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen

Koefisien Determinasi (R-square)

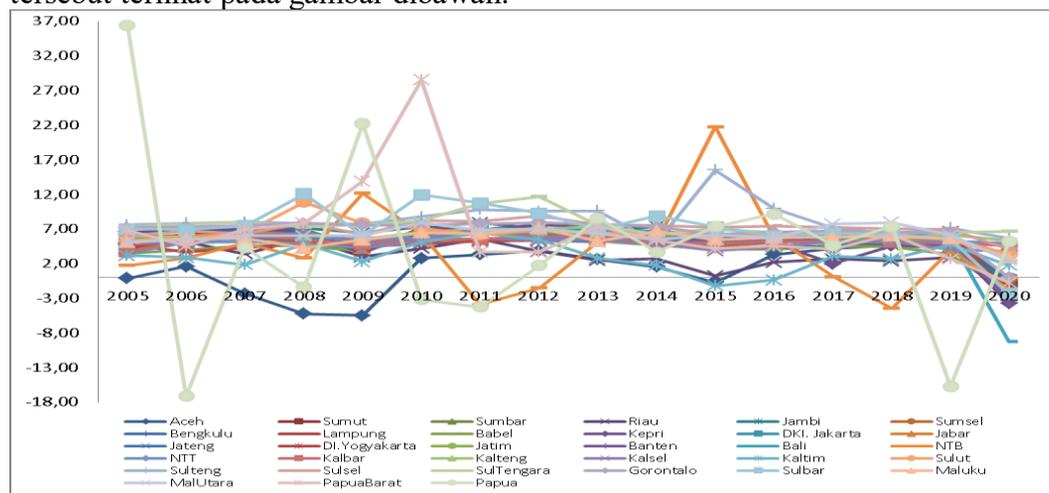
Menurut Widarjono (2018), koefisien determinasi (R^2) dipergunakan untuk menentukan ketelitian/kecocokkan garis persamaan regresi yang diperoleh model regresi dari data yang dianalisis dan menguraikan total varians yang bisa dijelaskan oleh model. Nilai R^2 (mendekati 1), berarti model makin baik dan sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi

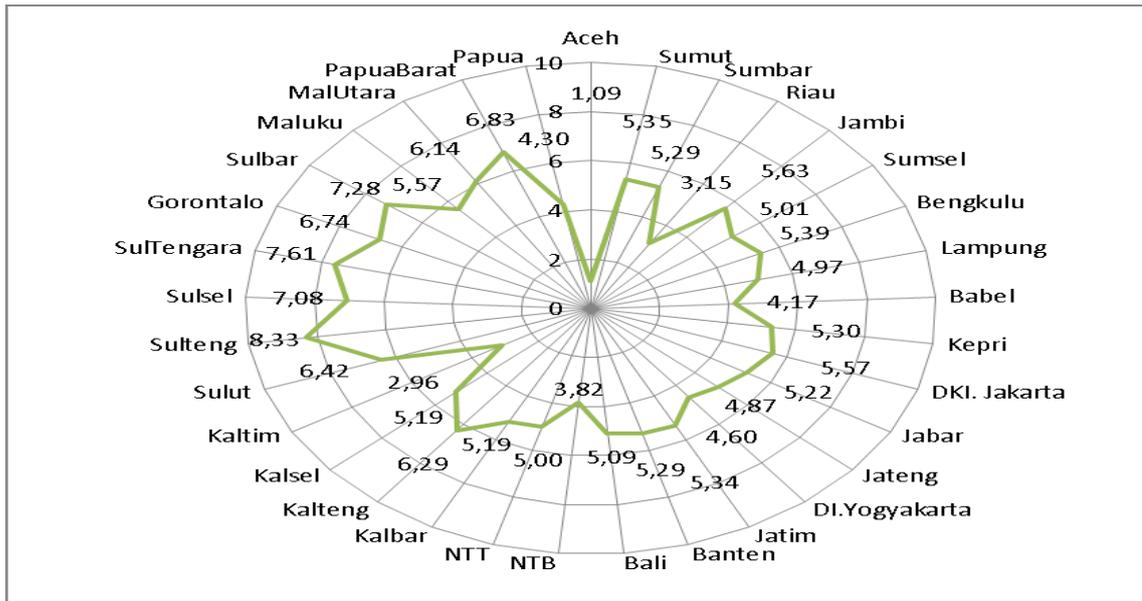
Pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa dalam masyarakat bertambah dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Pertumbuhan ekonomi positif menggambarkan pembangunan disuatu daerah sangat bagus, dimana peningkatannya terlihat dari besarnya nilai PDRB yang dicapai. Kenaikkan nilai tersebut ditentukan oleh faktor : sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya serta sumber daya modal yang dimiliki.

Kepemilikan faktor dan pemanfaatnya akan menentukan dan membuat keberhasilan pembangunan berbeda-beda antar daerah. Kondisi ini juga berlaku pada provinsi di Indonesia, dimana hasil penelitian memperlihatkan besarnya pertumbuhan ekonomi yang beragam selama tahun 2005-2020. Bervariasinya pertumbuhan ekonomi tersebut terlihat pada gambar dibawah.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2020

Rata-rata di 33 provinsi tidak termasuk Provinsi Kalimantan Utara memiliki pertumbuhan ekonomi 5,34 % dan lebih tinggi dari provinsi di Sumatera 4,54 %, provinsi di Jawa 5,15 %, Provinsi Bali + NTB + NTT 4,64 %, provinsi di Kalimantan 4,91 % tetapi lebih rendah dari provinsi di Sulawesi 7,24 % dan provinsi Maluku + Maluku Utara + Papua + Papua Barat 5,71 %. Provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Sulawesi Tengah 8,33 % dan terendah Aceh 1,09 %.



Gambar 2. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2020

Derajat desentralisasi fiskal dan bentuk pola hubungan

Ukuran kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dapat ditentukan dari besar-kecilnya pendapatan yang diterima dan belanja yang dikeluarkan. Indikator ini dikenal dengan derajat desentralisasi fiskal (DDF). Indikator pendapatan merupakan rasio pendapatan dari kemampuan daerah itu sendiri yaitu PAD terhadap total pendapatan daerah. Sementara indikator belanja merupakan rasio besarnya alokasi belanja dengan total belanja daerah. Semakin besar nilainya maka semakin besar pedelegasian wewenang atas sumber pendapatan dan pengalokasian anggaran daerah. Penelitian ini hanya melihat DDF dengan menggunakan indikator pendapatan. Hasil perhitungan yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan pola hubungan keuangan pemerintah provinsi terhadap pusat.

Bentuk hubungan menurut Paul Hersey dan Kemeth Balnchard dalam Halim (2001) terbagi atas: 1). Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dan daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. 2).Konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. 3).Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang dan daerah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. 4).Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada dan daerah benar- benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Berdasarkan hasil perhitungan rasio PAD terhadap total pendapatan (DDF) provinsi di Indonesia mempunyai rasio yang bervariasi, hal ini disebabkan adanya perbedaan kepemilikan sumberdaya yang dapat dijadikan sebagai potensi sumber penerimaan khususnya PAD disetiap provinsi.

Terdapat tiga pola hubungan yang ditemui yaitu : instruktif, konsultatif dan partisipatif. Rata-rata DDF untuk keseluruhan provinsi di Indonesia selama tahun 2005-2020 adalah 38,66 % atau rendah dan memiliki pola hubungan bersifat konsultatif. Artinya kemampuan PAD memberikan kontribusi terhadap total pendapatan hanya sebesar 38,66 % dan sisanya 61,34 % yaitu berasal dari dana perimbangan 51,50 % serta lain-lain pendapatan yang sah 9,84 %. Keadaan ini juga menjelaskan hubungan

Tabel 3. Rata-Rata Nilai DDF Dan Pola Hubungan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2005-2020

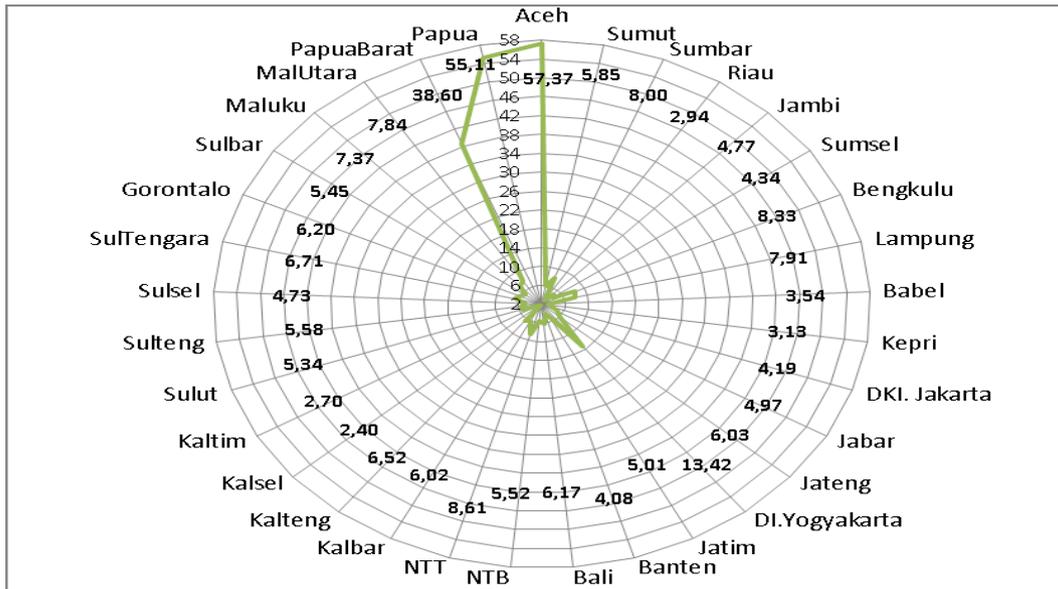
Provinsi	DDF (%)	Kemampuan	Pola Hubungan
Papua Barat	3,93	Sangat Rendah	Instruktif
Maluku Utara	12,19	Sangat Rendah	Instruktif
Aceh	13,58	Sangat Rendah	Instruktif
Sulawesi Barat	16,05	Sangat Rendah	Instruktif
Papua	16,54	Sangat Rendah	Instruktif
Maluku	18,04	Sangat Rendah	Instruktif
Gorontalo	19,28	Sangat Rendah	Instruktif
NTT	24,62	Sangat Rendah	Instruktif
Sulawesi Tenggara	25,05	Rendah	Konsultatif
Sulawesi Tengah	28,34	Rendah	Konsultatif
Bengkulu	33,17	Rendah	Konsultatif
Kalimantan Tengah	33,20	Rendah	Konsultatif
Kepulauan Riau	33,74	Rendah	Konsultatif
Bangka Belitung	33,84	Rendah	Konsultatif
Sulawesi Utara	35,04	Rendah	Konsultatif
NTB	36,99	Rendah	Konsultatif
Riau	38,21	Rendah	Konsultatif
Jambi	38,89	Rendah	Konsultatif
Kalimantan Barat	39,58	Rendah	Konsultatif
Sumatera Selatan	40,96	Rendah	Konsultatif
Sumatera Barat	44,23	Rendah	Konsultatif
Kalimantan Timur	44,71	Rendah	Konsultatif
DI. Yogyakarta	45,41	Rendah	Konsultatif
Lampung	47,55	Rendah	Konsultatif
Sulawesi Selatan	52,49	Sedang	Partisipatif
Kalimantan Selatan	55,69	Sedang	Partisipatif
Sumatera Utara	57,66	Sedang	Partisipatif
Bali	61,11	Sedang	Partisipatif
DKI. Jakarta	62,60	Sedang	Partisipatif
Jawa Tengah	63,59	Sedang	Partisipatif
Jawa Timur	65,92	Sedang	Partisipatif
Jawa Barat	66,76	Sedang	Partisipatif
Banten	66,80	Sedang	Partisipatif
Seluruh Provinsi	38,66	Rendah	Konsultatif

Sumber : Data diolah, 2023

Tabel 3 menjelaskan terdapat delapan provinsi yang memiliki rata-rata DDF dengan kemampuan sangat rendah atau mempunyai pola hubungan instruktif, enam belas provinsi dengan kemampuan rendah atau polanya konsultatif serta sembilan provinsi dengan kemampuan sedang atau hubungannya memiliki pola partisipatif.

Pendapatan daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2020

Berdasarkan Gambar 5 memperlihatkan rata-rata besarnya kontribusi lain-lain pendapatan terhadap total pendapatan perprovinsi di Indonesia.



Gambar 5. Rata-rata kontribusi lain-lain pendapatan yang sah padatotal

Pengaruh pola hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah dari derajat desentralisasi fiskal (DDF) terhadap pertumbuhan ekonomi tiap-tiap provinsi di Indonesia

Bentuk pola hubungan keuangan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat di Indonesia terlihat dari hasil perhitungan nilai DDF. Nilai tersebut digunakan untuk menentukan arah dan besarnya pengaruh yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia selama tahun 2005-2020. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi diantar provinsi bila dilihat dari nilai konstanta, koefisien estimasi regresi, probabilitas dan koefisien determinasinya. Kondisi ini sesungguhnya memperlihatkan antar provinsi memiliki kemampuan keuangan yang berbeda, terutama kesanggupan atau sumbangan yang diberikan PAD terhadap total pendapatan daerah. Sembilan provinsi nilai konstantanya negatif adalah : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan NTB. Sementara dua puluh empat bernilai positif yaitu : Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI. Jakarta, Jawa Barat, DI. Yogyakarta, Banten, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

Konstanta positif menjelaskan tanpa ada DDF (dianggap tidak berubah), maka pertumbuhan ekonomi pada tiap-tiap provinsi mengalami peningkatan serta sebaliknya bernilai negatif mengakibatkan terjadinya penurunan. Peningkatan terbesar terdapat di Provinsi Riau 11,26 % dan terendah Jawa Barat sebesar 0,61 %. Sementara penurunan tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat 12,12 % dan terkecil Sumatera Barat 0,27 %.

Melihat nilai koefisien regresi, maka ada bernilai positif dan negatif. Angka positif terdapat di dua puluh satu provinsi, dimana kenaikan pada DDF mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya negatif ada pada dua belas provinsi, artinya meningkatnya DDF menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

Tabel 4. Ringkasan hasil perhitungan regresi provinsi di Indonesia Tahun 2005-2020

Provinsi	Konstanta	Koefisien Regresi	Std. Error	t-Statistik	Prob.	R-squared
Aceh	-0,285541	0,101489	0,044752	3,383198	0,0072	0,310387
Sumut	-0,399842	0,000986	0,000396	2,489017	0,0271	0,322748
Sumbar	-0,269147	0,125668	0,033359	3,767139	0,0373	0,219358
Riau	11,25568	-0,212048	0,058524	-3,623253	0,0028	0,483927
Jambi	-5,482151	0,002858	0,001297	2,203944	0,0448	0,257585
Sumsel	3,578539	0,035055	0,094216	0,372070	0,0754	0,009791
Bengkulu	4,071662	0,039763	0,082861	0,479876	0,6387	0,016182
Lampung	-1,737557	0,141110	0,049059	2,876333	0,0266	0,106809
Babel	10,12031	-0,175840	0,106310	-1,654029	0,1204	0,163471
Kepri	5,760019	-0,000137	0,000965	-0,142192	0,8890	0,061442
DKI.Jakarta	10,20499	0,074091	0,020555	3,604524	0,0314	0,073018
Jabar	0,607545	0,069024	0,065299	1,057045	0,0084	0,073911
Jateng	-0,292160	0,081189	0,071388	1,137281	0,0275	0,084573
DI.Yogyakarta	8,065035	-0,000645	0,000182	-3,537892	0,0036	0,490529
Jatim	-3,269954	0,001288	0,000241	5,349886	0,0001	0,687660
Banten	0,703089	0,000686	0,001407	0,487387	0,6335	0,016684
Bali	-3,464890	0,140053	0,197574	0,708863	0,4900	0,034648
NTB	-12,11824	0,004005	0,003004	1,332945	0,0054	0,210239
NTT	6,671866	-0,067741	0,048235	-1,404407	0,1820	0,123486
Kalbar	5,569797	-0,009563	0,043639	-0,219145	0,8297	0,003419
Kalteng	4,190727	0,000627	0,000263	2,386682	0,0329	0,304673
Kalsel	2,791488	0,043010	0,072224	0,595514	0,5610	0,024705
Kaltim	6,232023	-0,073283	0,049809	-1,471292	0,1633	0,133915
Sulut	6,916355	-0,014167	0,113185	-0,125164	0,9022	0,061118
Sulteng	3,263293	0,001833	0,001787	1,025867	0,3237	0,074891
Sulsel	5,072271	0,000388	0,000408	0,949644	0,3596	0,064871
Sultenggara	4,957016	0,105964	0,027778	3,814674	0,0196	0,317059
Gorontalo	10,66388	-0,203515	0,160927	-1,264640	0,2266	0,102525
Sulbar	9,565261	-0,001428	0,002423	-0,589374	0,5657	0,026025
Maluku	4,346429	0,000684	0,000465	1,469569	0,1655	0,142459
MalUtara	7,809600	-0,136869	0,115721	-1,182747	0,2566	0,090844
Papua Barat	9,365286	-0,644259	0,866690	-0,743356	0,4696	0,037971
Papua	0,872186	0,207213	0,159409	1,299881	0,2146	0,107694

Sumber: Data diolah, 2023

Provinsi dengan DDF positif-tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi paling besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada di Provinsi Papua dengan

koefisien regresi 0,207213, probabilita $0,2146 > 0,05$ (alpa yang digunakan) dan koefisien determinasi (*R-squared*) 0,107694 atau mampu memberikan perubahan sebesar 10,77 %. Peningkatan DDF 1 % maka mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 0,207213 %.

Sementara Provinsi Sulawesi Selatan paling rendah dengan nilai koefisien sebesar 0,000388, probabilita $0,3596 > 0,05$ dan koefisien determinasi 0,064871 atau 6,49 %. Kenaikkan DDF 1 % maka pertumbuhan ekonomi naik hanya sebesar 0,000388 %. Kondisi yang sama juga terdapat di provinsi : Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Maluku.

Provinsi lain dengan pengaruh positif-signifikan terbesar adalah Provinsi Lampung dengan koefisien regresi 0,141110, probabilita $0,0266 < 0,05$ dan koefisien determinasi 0,106809 atau 10,68 %. Bila DDF meningkat 1 % mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,141110 %. Pada Provinsi Kalimantan Tengah, DDFnya paling rendah dalam meningkat pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0,000627, probabilita $0,0329 < 0,05$ serta koefisien determinasinya 0,304673 atau 30,47 %. Dimana kenaikan DDF 1 % hanya menaikkan pertumbuhan ekonomi 0,000627 %. Kondisi yang sama juga ditemui diprovinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, DKI.Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara. Pengaruh negatif-tidak signifikan DDF terhadap pertumbuhan ekonomi di temukan pada beberapa provinsi. Provinsi Papua Barat memiliki koefisien regresi negatif paling besar yaitu -0,644259, probabilita $0,4696 > 0,05$ dan koefisien determinasi 0,037971 atau 3,80 %. Artinya, jika DDF meningkat 1 % berdampak menurun pertumbuhan ekonomi 0,644259 %.

Kepulauan Riau, DDFnya memberikan penurunan terkecil pada pertumbuhan ekonomi, dimana koefisien regresinya sebesar -0,000137, probabilitanya $0,8890 > 0,05$ serta koefisien determinasi 0,001442 atau 1,44 %. Bila DDF meningkat 1 % menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun 0,000137 %. Provinsi lain yang mempunyai kondisi sama dengan diatas adalah: Bangka Belitung, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Sementara DDF koefisien regresi negatif tetapi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi terdapat di Provinsi Riau dan DI. Yogyakarta.

Analisis pola hubungan

Pola hubungan instruktif pada delapan provinsi, tiga provinsi yaitu Aceh, Maluku Utara dan Papua dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi walaupun pengaruhnya ada yang signifikan/tidak signifikan dan lima provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat dan NTT menyebabkan penurunan serta berpengaruh tidak signifikan. Adapun rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar 5,37 %. Bentuk ini menjelaskan masih sangat besar keterlibatan pemerintah pusat terhadap keuangan pemerintah daerah, dimana dominasi dana perimbangan (bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU dan DAK) rata-rata 61,15 % dan lain-lain pendapatan yang sah 23,32%.

Enam belas provinsi mempunyai pola hubungan konsultatif dan jumlahnya paling banyak. Sembilan provinsi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan enam berpengaruh signifikan yaitu: Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Sulawesi Tenggara, NTB, Kalimantan Tengah, dan tiga tidak signifikan adalah Sumatera Selatan, Bengkulu serta Sulawesi Tengah. Sementara yang berdampak menurunkan pertumbuhan ekonomi ada tujuh, dua berpengaruh signifikan yaitu provinsi Riau dan DI. Yogyakarta serta lima tidak signifikan (Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat). Dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi diatas

adalah 5,26%. Pada posisi ini provinsi sudah sedikit mampu membiayai belanjanya dan campur tangan pusat sudah mulai berkurang, dimana rata-rata dana perimbangan berperan sebesar 56,65 % dan lain-lain pendapatan yang sah 5,92%.

Provinsi dengan pola partisipatif ada sembilan dan semuanya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lima berpengaruh signifikan yaitu: Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Banten, Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan berpengaruh tidak signifikan. Provinsi dengan pola ini memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,45 %. Kategori ini mencerminkan pendapatan provinsi mendekati mampu membiayai belanja daerah dan peran pemerintah pusat semakin berkurang, hal ini ditandai dengan rata-rata dana perimbangan hanya sebesar 33,77 % sedangkan lain-lain pendapatan yang sah 4,83 %.

Berdasarkan analisis diatas memperlihatkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan (DDF) yang diperoleh setiap provinsi relative belum mampu mengurangi keterlibatan pemerintah pusat ikut campur tangan mengatur pengelolaan keuangan dalam pembangunan di Indonesia. Kondisi ini memberi dampak pada bentuk pola hubungan yang terjadi serta pengaruhnya atas perekonomian daerah (pertumbuhan ekonomi) di setiap provinsi yang beragam.

Secara keseluruhan terdapat dua puluh satu provinsi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,35% dan rata-rata DDF 44,20%. Dari jumlah tersebut tiga berpola hubungan instruktif dengan rata-rata DDF 16,05% dan pertumbuhan ekonomi 3,65%, sembilan pola konsultatif dengan rata-rata DDF 36,39% dan pertumbuhan ekonomi 5,82% serta sembilan provinsi mempunyai pola hubungan partisipatif dengan rata-rata DDF dan pertumbuhan ekonomi 61,40 % dan 5,45%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Akai dan Sakata (2002) di Amerika Serikat, Zhang dan Zao (2001) di China dan India, Feltenstein dan Iwata (2005) di China, Wibowo (2008) di Indonesia, Sarmini dkk (2010) di Iran dan Zahir (2011) di Pakistan. Sementara dua belas provinsi memberi akibat penurunan pertumbuhan ekonomi dan mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi dan DDFnya adalah 5,32% dan 28,88%. Secara rinci terdapat lima memiliki pola Instruktif dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 6,40 % dan DDF 15,21 % dan tujuh berpola hubungan konsultatif dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan DDF adalah 4,54% dan 38,65%. Kondisi ini searah dengan hasil penelitian Philips dan Woller (1997) serta Davodi dan Zao (1998) di 46 negara maju dan berkembang, Zhang dan Zao (2001) di China, Thornton (2007) di 19 negara OECD dan Gemmel dkk (2013) di 23 negara OECD.

Peningkatan yang terjadi disebabkan setiap provinsi bisa menaikkan pendapatan yang diperoleh dengan memanfaatkan potensi yang ada sebagai sumber pendapatan terutama PAD, memiliki kemampuan mengalokasikan penggunaan dana pada sektor ekonomi yang mampu mendorong efisiensi ekonomi serta menggerakkan roda perekonomian karena dianggap lebih mengetahui apa yang dibutuhkan di banding pemerintah pusat. Penurunan yang terjadi disebabkan kebalikan penjelasan sebelumnya diatas juga disebabkan belum mampu menjaga stabilitas ekonomi akibat terbatasnya dana berasal dari pemerintah pusat yang membawa dampak mengurangi belanja dan terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rata-rata keseluruhan provinsi di Indonesia: pertumbuhan ekonomi naik 5,34 % dan memiliki pola hubungan bersifat konsultatif (DDF = 38,66%) dengan delapan

instruktif, enam belas konsultatif serta sembilan partisipatif. Pola hubungan memberi pengaruh berbeda-beda terhadap pertumbuhan ekonomi setiap provinsi. Dimana hubungan berpola instruktif yang mampu meningkatkan dan menurunkan pertumbuhan ekonomi masing-masing berjumlah tiga dan lima provinsi dengan pengaruh signifikan/tidak signifikan. Pada pola konsultatif, terdapat sembilan dan tujuh provinsi dapat meningkatkan dan menurunkan pertumbuhan ekonomi dengan pengaruh signifikan/tidak signifikan). Sementara provinsi dengan pola partisipatif berjumlah sembilan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pengaruh signifikan/tidak signifikan).

Saran

Pertumbuhan ekonomi harus diupayakan meningkat melalui peningkatan alokasi belanja pada sektor yang mampu menciptakan nilai tambah (output) besar atau kecil secara merata dalam perekonomian dan mendorong pemanfaatan potensi kepemilikan sumber daya secara lebih optimal untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya PAD disetiap provinsi.

Pengaruh positif dan negatif dari pola hubungan (DDF) pada pertumbuhan ekonomi kedepan harus mengalami perubahan. Upaya yang perlu dilakukan adalah adanya kemampuan menciptakan pemanfaatan anggaran (pendapatan/belanja) secara efisiensi dan efektif serta mengalihkan sebagian pengelolaan pendapatan pemerintah pusat untuk dikelola sendiri oleh pemerintah provinsi menjadi pendapatan asli daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, J., Prakosa, S. F., Islami, & Retno, Rr. (2019). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1).
- Akai, N., & Sakata, M. (2002). Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State Level Cross Section Data for the United States. *Journal of Urban Economics*, 52, 93–108.
- Anisa, A. N., Machmoed, A. G. K., & Niode, A. O. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(3).
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arsyad, L. (2018). *Ekonomi Pembangunan (Edisi Kelima)*. UPP STIM YKPN.
- Astuti, S., & Mispiyanti. (2019). *Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia dengan studi kasus Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah*. Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers. Fakultas Ekonomi Universitas Tidar.
- Badan Pusat Statistik. (Tahun 2015-2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (Tahun 2015-2021). *Statistik Indonesia*. Republik Indonesia.
- Berliani, K. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka. *Jurnal Indonesia Membangun*, 2(1).
- Davoodi, H., & Zou, H.-f. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth: a Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*, 43, 244–257.
- Eka, H., & Umar, M. (2019). Analisis Pengaruh Investasi Dan Budget Deficit Terhadap Pertumbuhan Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1).

- Eko, H. P. (2020). Kemandirian keuangan daerah Kabupaten di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah UNTAG*.
- Feltenstein, A., & Iwata, S. (2005). Decentralization and macroeconomic performance in China: Regional Autonomy Has its Costs. *Journal of Development Economics*, 76(2), 481–501.
- Gemmel, N., Kneller, R., & Sanz, I. (2013). Fiscal Decentralization and Economic Growth: Spending Versus Revenue Decentralization. *Economic Inquiry*, 51(4), 1915–1931.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi keuangan daerah (Edisi Ketiga)*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2019). *Pengelolaan keuangan daerah*. UPP STIM YKPN.
- Hidayat, T., & Tahawa, B. (2021). Hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dan Persentase Kemiskinan Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013-2018. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 3(2).
- Jhingan, M. L. (2017). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Rajawali Press.
- Kuncoro, M. (2019). *Ekonomika Regional: Teori Dan Aplikasi*. Rajawali Press.
- Karenina, S., Krisna, D., Andayani, D., & Mohammad, W. (2021). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1).
- Khusaini, M. (2019). *Ekonomi publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Linawati, & Suhardi. (2017). Kemandirian dan efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di moderasi alokasi belanja modal. *Jurnal Ekuivalen*, 3(2).
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik*. UII Press.
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mustaqiem. (2017). *Keuangan Negara*. Litera.
- Phillips, K. L., & Woller, G. (1997). *Does fiscal decentralization lead to economic growth? working paper*.
- Puspita, P., & Septiani, T. (2019). Determinan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari pendapatan daerah dan kemandirian daerah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2).
- Rahmadi, S., & Hastuti, D. (2023). Peran Pengelolaan Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Pasar Rakyat Aur Duri . *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 29–36. <https://doi.org/10.53867/jpm.v3i1.71>
- Rahmadi, S. , Hastuti, D., & Parmadi, P. (2022). Pengaruh belanja modal urusan wajib dan urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin dengan jumlah pengangguran sebagai variabel intervening di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 213-234. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.15726>
- Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(2), 55 - 66. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i2.6948>
- Rosnidah, I. (2018). *Keuangan negara dan daerah*. Deepublish.
- Royda, & Riana, D. (2019). Analisis Kemandirian Dan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 14(2).
- Sarmimi, A. J., Karimi, S., Gholamreza, P. L., & Alizadeh, M. (2010). Fiscal decentralization and economic growth in Iran. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 4(11), 5490–5495.
- Subandi. (2018). *Ekonomi pembangunan*. Alfabeta.
- Suhanda. (2017). *Akuntansi keuangan pemerintah daerah*. Andalas Lima Sisi.

- Suparmoko, M. (2013). *Keuangan negara dalam teori dan praktek (Edisi Keenam)*. BPFE.
- Suparmoko, M. (2019). *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah (Edisi Pertama)*. Andi.
- Suprayitno, B. (2018). *Ekonomi publik: konsep dan implementasi kebijakan*. UPP STIM YKPN.
- Sukirno, S. (2017). *Ekonomi pembangunan (cetakan keenam)*. Kencana: Jakarta.
- Todaro, P. M. (2016). *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesebelas)*. Erlangga: Jakarta.
- Thornton, J. (2007). Fiscal decentralization and economic growth reconsidered. *Journal of Urban Economics*, 61, 64–70.
- Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi publik*. Raja Grafindo Persada: Depok
- Wibowo, P. (2008). Mencermati dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 55–83.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya (edisi keempat)*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Zainal, A. S. (2016). *Kebijakan publik*. Salemba Empat.
- Zahir, M. F. (2011). Contribution of fiscal decentralization to economic growth: evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 31(1), 1–13.
- Zang, T., & Zau, H.-f. (2001). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. *Journal of Public Economics*, 67, 221–240.
- Zhang, T., & Zou, H.-f. (2001). *The growth impact of intersectoral and inter-governmental allocation of public expenditure: with application in China and India*. China Economics.